



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu memberikan keseragaman standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Standar Kebutuhan Barang dan Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.

KEDUA : Menetapkan Standar Kebutuhan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.

KETIGA : Menetapkan Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Menetapkan Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.
- KELIMA : Dalam hal belum ada pengaturan mengenai rincian Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Standar Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat mengatur dengan berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	URAIAN							VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
								UNIT	SATUAN			
1	2							3	4	5	6	7
I.	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN											
1.	Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran											Sesuai Tahapan
	a.	Penyusunan rencana kebutuhan anggaran pemilihan		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Pembahasan dengan TAPD dan DPRD		paket	x Rp			paket	Rp....			
	c.	Pengelolaan Program dan Revisi Anggaran		paket	x Rp			paket	Rp....			
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)								paket	Rp....		Sesuai Tahapan
3.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan											Sesuai Tahapan
	a.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Rapat Penyusunan Regulasi		paket	x Rp			paket	Rp....			
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis											Sesuai Tahapan
	a.	Sosialisasi/Penyuluhan		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Bimbingan Teknis		paket	x Rp			paket	Rp....			
5.	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP											Sesuai Tahapan
	a.	Pembentukan dan Pelantikan PPK		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Pembentukan dan Pelantikan PPS		paket	x Rp			paket	Rp....			
	c.	Pembentukan dan Pelantikan KPPS		paket	x Rp			paket	Rp....			
	d.	Pembentukan PPDP		paket	x Rp			paket	Rp....			
	e.	Bimbingan Teknis PPK		paket	x Rp			paket	Rp....			
	f.	Bimbingan Teknis PPS		paket	x Rp			paket	Rp....			
	g.	Bimbingan Teknis KPPS		paket	x Rp			paket	Rp....			
	h.	Bimbingan Teknis PPDP		paket	x Rp			paket	Rp....			
6.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih											Sesuai Tahapan
	a.	Penyusunan daftar pemilih		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Pemutakhiran data pemilih		paket	x Rp			paket	Rp....			
	c.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS		paket	x Rp			paket	Rp....			
	d.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT		paket	x Rp			paket	Rp....			
	e.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPTB		paket	x Rp			paket	Rp....			
7.	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan											Sesuai Tahapan
	a.	KPU Provinsi/KIP Aceh		Prov	x	paket x Rp.		paket	Rp....			
	b.	KPU/KIP Kabupaten/Kota		Kab/Kota	x	paket x Rp.		paket	Rp....			
	c.	PPK		Kec	x	paket x Rp.		paket	Rp....			
	d.	PPS		Desa	x	paket x Rp.		paket	Rp....			
8.	Pencalonan											Sesuai Tahapan
	a.	Pengumuman pendaftaran dan pendaftaran		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada Masyarakat		paket	x Rp			paket	Rp....			
	c.	Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon		paket	x Rp			paket	Rp....			
	d.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon		paket	x Rp			paket	Rp....			
	e.	Penetapan pasangan calon resmi		paket	x Rp			paket	Rp....			
	e.	Pengumuman Pasangan Calon Resmi		paket	x Rp			paket	Rp....			
9.	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye											Sesuai Tahapan
	a.	Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Bahan Kampanye		paket	x Rp			paket	Rp....			
	c.	Alat Peraga (termasuk biaya pemasangan, perawatan dan/atau bencana alam)		paket	x Rp			paket	Rp....			
	d.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik		paket	x Rp			paket	Rp....			
10.	Laporan Audit Dana Kampanye											Sesuai Tahapan
	a.	Dokumen audit dana kampanye		paket	x Rp			paket	Rp....			
	b.	Akuntan Publik		paket	x Rp			paket	Rp....			
	c.	Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye		paket	x Rp			paket	Rp....			
11.	Proses Perhitungan											Sesuai Tahapan
	a.	Persiapan Penghitungan/Rekapitulasi		Kab/Kota	x	hari x orang x Rp.		OB	Rp....			

NO	URAIAN							VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
								UNIT	SATUAN			
1	2							3	4	5	6	7
14.	Rapat Kerja/Pelatihan/Bimtek dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS											Sesuai Tahapan
	a. Rapat Kerja/Pelatihan		Kab/Kota	x		Keg	x Rp.		Keg	Rp....		
	b. Biaya Panitia		Kab/Kota	x		Keg	x Rp.		Keg	Rp....		
15.	Rapat Kerja dan Supervisi											
	a. Rapat Kerja											
	- Dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota atau di Provinsi)		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota)		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPS (di Kecamatan)		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan Pihak lain		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	b. Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
16.	Perjalanan Dinas											
	a. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Pusat		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	b. Dalam Rangka Rapat Kerja/Sosialisasi/Bimbingan Teknis :											
	- Dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota atau di Provinsi)		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota)		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPS (di Kecamatan)		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	c. Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS)		orang	x		kali	x Rp.		OK	Rp....		
	dalam Rangka Validasi Data Pemilih											
17.	Evaluasi dan Pelaporan											Sesuai Tahapan
	a. Laporan Tahapan Pemilihan					paket	x Rp.		paket	Rp....		
	b. Laporan Keuangan					paket	x Rp.		paket	Rp....		
II.	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
18.	Pemeliharaan											
	a. Kantor/Inventaris		paket	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	b. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2		paket	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
19.	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2											
	a. Roda 4		unit	x		bulan	x Rp.		KB	Rp....		
	b. Roda 2		unit	x		bulan	x Rp.		KB	Rp....		
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh											
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	3) Sidang/rapat biasa				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	4) Pengamanan Kantor				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	5) Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan		Kab/Kota	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	6) Dokumentasi/Publikasi		Kab/Kota	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	b. KPU/KIP Kabupaten/Kota											
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	3) Sidang/rapat biasa				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	4) Pengamanan kantor				bulan	x Rp.		bulan	Rp....			
	5) Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan		Kab/Kota	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	6) Dokumentasi/Publikasi		Kab/Kota	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	c. PPK											
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)		PPK	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet		PPK	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	3) Sidang/rapat biasa		PPK	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	4) Sewa gedung kantor *)		PPK	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	5) Sewa komputer dan printer		PPK	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	6) Perjalanan Dinas/Transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)		PPK	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	d. PPS											
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)		Ds/Kel	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet		Ds/Kel	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	3) Sidang/Rapat Biasa		Ds/Kel	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	4) Sewa Gedung Kantor*)		Ds/Kel	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	5) Perjalanan Dinas/Transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)		Ds/Kel	x		bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	e. KPPS											
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)				TPS	x Rp.		PB	Rp....			
	2) Konsumsi (makan dan snack)		TPS	x		orang	x Rp.		PB	Rp....		
	3) Biaya pembuatan TPS (Tenda, Meja, Kursi, <i>sound system</i> , dan lain-lain)		TPS				x Rp.		PB	Rp....		
21.	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya											
	a. Kendaraan operasional roda 4		unit	x		bulan	x Rp.		unit	Rp....		
	b. Kendaraan operasional roda 2		unit	x		bulan	x Rp.		unit	Rp....		
	c. Kendaraan lainnya (transport logistik)		unit	x		kali	x Rp.		kali	Rp....		
	d. Kendaraan operasional roda 2 untuk PPK		PPK	x		unit	x Rp.		unit	Rp....		
22.	Pengelolaan Logistik Pemilihan											
	a. Sewa gudang					paket	x Rp.		paket	Rp....		
	b. Pengamanan gudang		orang	x		Kab/Kota	x Rp.		OB	Rp....		
	c. Pengawasan proses logistik (surat suara, dan lain-lain)					paket	x Rp.		paket	Rp....		
	d. Sortir dan lipat surat suara					lembar SS	x Rp.		lembar	Rp....		
	e. Pengesetan formulir					paket	x Rp.		paket	Rp....		
	f. Penyiapan kotak dan bilik suara											
	- Persiapan pengelolaan logistik pra Pemilihan (pengepakan)	(... buah		x		TPS)	x Rp.		buah	Rp....		

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
	- Kotak suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumumium)	(... buah	x TPS)	x Rp.		buah
	- Bilik pemungutan suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumumium)	(... buah	x TPS)	x Rp.		buah
	JUMLAH					

Keterangan :
Sewa gedung kantor, apabila Pemerintah Daerah tidak menyediakan gedung/kantor untuk PPK dan PPS.
Penyediaan gedung kantor bagi PPK dan PPS oleh Pemerintah Daerah maupun sewa gedung kantor sudah termasuk dengan kelengkapan perkantoran (meja, kursi, kelengkapan kerja, dll)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,
Nur Syarifah

STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN					VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
						UNIT	SATUAN			
1	2					3	4	5	6	7
I.	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN									
1.	Perencanaan Program dan Anggaran									Sesuai Tahapan
	a.	Penyusunan kebutuhan anggaran Pemilihan		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Pembahasan dengan TAPD dan DPRD		paket	x Rp		paket	Rp....		
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)						paket	x Rp		Sesuai Tahapan
3.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan									Sesuai Tahapan
	a.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Rapat Penyusunan Regulasi		paket	x Rp		paket	Rp....		
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis									Sesuai Tahapan
	a.	Sosialisasi/Penyuluhan		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Bimbingan Teknis		paket	x Rp		paket	Rp....		
5.	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP									Sesuai Tahapan
	a.	Pembentukan dan Pelantikan PPK		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Pembentukan dan Pelantikan PPS		paket	x Rp		paket	Rp....		
	c.	Pembentukan dan Pelantikan KPPS		paket	x Rp		paket	Rp....		
	d.	Pembentukan PPDP		paket	x Rp		paket	Rp....		
	e.	Bimbingan Teknis PPK		paket	x Rp		paket	Rp....		
	f.	Bimbingan Teknis PPS		paket	x Rp		paket	Rp....		
	g.	Bimbingan Teknis KPPS		paket	x Rp		paket	Rp....		
	h.	Bimbingan Teknis PPDP		paket	x Rp		paket	Rp....		
6.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih									Sesuai Tahapan
	a.	Penyusunan daftar pemilih		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Pemutakhiran data pemilih		paket	x Rp		paket	Rp....		
	c.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS		paket	x Rp		paket	Rp....		
	d.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT		paket	x Rp		paket	Rp....		
	e.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPTB		paket	x Rp		paket	Rp....		
7.	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan									Sesuai Tahapan
	a.	KPU/KIP Kabupaten/Kota		Kab/Kota	x paket x Rp.		paket	Rp....		
	b.	PPK		Kec	x paket x Rp.		paket	Rp....		
	c.	PPS		Desa	x paket x Rp.		paket	Rp....		
8.	Pencalonan									Sesuai Tahapan
	a.	Pengumuman pendaftaran dan pendaftaran		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pada masyarakat		paket	x Rp		paket	Rp....		
	c.	Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon		paket	x Rp		paket	Rp....		
	d.	Pemeriksaan kesehatan pasangan calon		paket	x Rp		paket	Rp....		
	e.	Penetapan pasangan calon		paket	x Rp		paket	Rp....		
	e.	Pengumuman pasangan calon		paket	x Rp		paket	Rp....		
9.	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye									Sesuai Tahapan
	a.	Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Bahan Kampanye		paket	x Rp		paket	Rp....		
	c.	Alat Peraga (termasuk biaya pemasangan, perawatan dan/atau bencana alam)		paket	x Rp		paket	Rp....		
	d.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik		paket	x Rp		paket	Rp....		
10.	Laporan Audit Dana Kampanye									Sesuai Tahapan
	a.	Dokumen audit dana kampanye		paket	x Rp		paket	Rp....		
	b.	Akuntan Publik		paket	x Rp		paket	Rp....		
	c.	Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye		paket	x Rp		paket	Rp....		
11.	Proses Perhitungan									Sesuai Tahapan
	a.	Persiapan Penghitungan/Rekapitulasi		Kab/Kota	x hari x orang x Rp.		OB	Rp....		
	b.	Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara		paket	x kali x Rp.		paket	Rp....		

NO	URAIAN					VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET	
						UNIT	SATUAN				
1	2					3	4	5	6	7	
	c. Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara	 paket	x kali		x Rp.		paket	Rp....			
12.	Advokasi Hukum		 Prov/ Kab/Kota	x 1	paket	x Rp.		paket	Rp....		Sesuai Tahapan
	a. Dokumen advokasi hukum	 paket	x Rp				paket	Rp....			
	b. Pengadaan jasa konsultan/pengacara	 paket	x Rp				paket	Rp....			
13.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara									Sesuai Tahapan	
	a. Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan										
	1) Kegiatan pengadaan barang dan jasa	 paket	x kali		x Rp.		paket	Rp....			
	2) Cetak surat suara	(..... DPT	x 102.5%)	+ 2000	lembar	x Rp.		lembar	Rp....		
	3) Penggandaan Formulir										
	- Formulir A KWK	 TPS	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Formulir B KWK	 paket	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Formulir C KWK	 TPS	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Formulir D KWK	 PPS	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Formulir DAA KWK	 PPK	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Formulir DA KWK	 PPK	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Formulir DB KWK	 Kab/Kota	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Formulir DC KWK	 Prov	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	- Stiker Pemutakhiran data pemilih	 Kab/Kota	x	lembar	x Rp.		paket	Rp....			
	4) Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan										
	- Kabupaten/Kota	 Kab/Kota	x	eks	x Rp.		paket	Rp....			
	- PPK	 PPK	x	eks	x Rp.		paket	Rp....			
	- KPPS/TPS	 TPS	x	eks	x Rp.		paket	Rp....			
	- PPDP	 TPS	x	eks	x Rp.		paket	Rp....			
	b. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya										
	1) Kotak Suara	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	2) Bilik Pemungutan Suara	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	3) Tinta sidik jari	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	4) Segel										
	- Tingkat Kab/Kota	((.... keping x Kab/Kota)	+ (... keping x TPS))		x Rp.		keping	Rp....			
	- Tingkat PPK	((.... keping x PPK)	+ (... keping x TPS))		x Rp.		keping	Rp....			
	- Tingkat KPPS	(... keping x TPS)			x Rp.		keping	Rp....			
	5) Sampul (Kubus dan Biasa)										
	- Sampul II.S1 KWK	 buah	x	Kab/Kota	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul II.S2 KWK	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul III.S1 KWK	 buah	x	PPK	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul DAA KWK	 buah	x	PPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul V.S1 KWK	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul V.S2.1 KWK	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul V.S2.2 KWK	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul V.S2.3 KWK	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul V.S3 KWK	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul kecil	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	- Sampul DPT/DPT-b	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	6) Bantalan dan Alat Pencoblos	 set	x	TPS	x Rp.		set	Rp....			
	7) Tanda pengenal (KPPS + PAM + saksi)	x lembar	x	TPS	x Rp.		lembar	Rp....			
	8) Karet pengikat	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	9) Lem perekat	((.... botol x PPK)	+ (... botol x TPS))		x Rp.		botol	Rp....			
	10) Kantong plastik	((.... buah x PPK)	+ (... buah x TPS))		x Rp.		buah	Rp....			
	11) Ballpoint	((.... buah x PPK)	+ (... buah x TPS))		x Rp.		buah	Rp....			
	12) Gembok	((.... buah x PPK)	+ (... buah x TPS))		x Rp.		buah	Rp....			
	13) Spidol besar	((.... buah x PPK)	+ (... buah x TPS))		x Rp.		buah	Rp....			
	14) Spidol kecil	((.... buah x PPK)	+ (... buah x TPS))		x Rp.		buah	Rp....			
	15) Sticker nomor Kotak Suara	 lembar	x	TPS	x Rp.		lembar	Rp....			
	16) Alat bantu tuna netra	 lembar	x	TPS	x Rp.		lembar	Rp....			
	17) Daftar pasangan calon	 lembar	x	TPS	x Rp.		lembar	Rp....			
	18) Hologram	 keping	x	TPS	x Rp.		keping	Rp....			
	19) Sarana/papan pengumuman	 buah	x	TPS	x Rp.		buah	Rp....			
	20) Salinan DPT (3 + saksi)	x lembar	x	TPS	x Rp.		lembar	Rp....			
	21) Kotak untuk BA Rekapitulasi ((1 buah x Kab/Kota) + (3 buah x PPK))	x Rp.		buah	Rp....						
	22) Stiker label Kotak untuk BA ((1 buah x Kab/Kota) + (3 buah x PPK))	x Rp.		buah	Rp....						
c.	Distribusi - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya)										
	1) Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya (PPK/PPD)	 rate/PP	x	PPK	x Rp.		PP	Rp....			
	2) Dari Kecamatan Ke Desa/Kelurahan/sebutan lainnya (PPS)	 rate/PP	x	PPS	x Rp.		PP	Rp....			
	3) Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	 rate/PP	x	TPS	x Rp.		PP	Rp....			
d.	Honorarium Pengelola										
	1) Honor Pokja ULP	 paket	x Rp.		OP	Rp....					
	2) Honor Sekretariat Pokja ULP	 bulan	x Rp.		OB	Rp....					
	3) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	 orang	x	bulan	x Rp.		OB	Rp....			
	4) Honorarium Tenaga Pendukung	 orang	x	bulan	x Rp.		OB	Rp....			
	5) Honorarium operator komputer	 orang	x	bulan	x Rp.		OB	Rp....			

NO	URAIAN					VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
						UNIT	SATUAN			
1	2					3	4	5	6	7
14.	Rapat kerja/Pelatihan/Bimtek dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS									Sesuai Tahapan
	a. Rapat kerja/pelatihan	 Kab/Kota	x	Keg	x Rp.		Keg	Rp....		
	b. Biaya Panitia	 Kab/Kota	x	Keg	x Rp.		Keg	Rp....		
15.	Rapat Kerja dan Supervisi									
	a. Rapat Kerja									
	- Dengan KPU Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota atau di Provinsi)	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota)	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan pihak lain	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	b. Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
16.	Perjalanan Dinas									
	a. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat kerja, Bimbingan teknis ke Provinsi/I	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	b. Dalam Rangka Rapat kerja/Sosialisasi/Bimbingan teknis :									
	- Dengan KPU Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota)	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota)	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	c. Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS)	 orang	x	kali	x Rp.		OK	Rp....		
	dalam Rangka Validasi Data Pemilih									
17.	Evaluasi dan Pelaporan									Sesuai Tahapan
	a. Penyusunan Tahapan Pemilihan			paket	x Rp.		paket	Rp....		
	b. Penyusunan Keuangan			paket	x Rp.		paket	Rp....		
II.	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
18.	Pemeliharaan									
	a. Kantor/Inventaris	 paket	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	b. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	 paket	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
19.	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2									
	a. Roda 4	 unit	x	bulan	x Rp.		KB	Rp....		
	b. Roda 2	 unit	x	bulan	x Rp.		KB	Rp....		
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh									
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	3) Sidang/Rapat Biasa			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	4) Pengamanan Kantor			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	5) Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi dan Pelaporan	 Kab/Kota	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	6) Dokumentasi/Publikasi	 Kab/Kota	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	b. KPU /KIP Kabupaten/Kota									
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	3) Sidang/Rapat Biasa			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	4) Pengamanan Kantor			bulan	x Rp.		bulan	Rp....		
	5) Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi dan Pelaporan	 Kab/Kota	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	6) Dokumentasi/Publikasi	 Kab/Kota	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	c. PPK									
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	 PPK	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	 PPK	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	3) Sidang/Rapat Biasa	 PPK	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	4) Sewa Gedung Kantor*)	 PPK	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	5) Sewa Komputer dan printer	 PPK	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	6) Perjalanan Dinas/Transport (Rapat kerja, Pelantikan, dan lain-lain)	 PPK	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	d. PPS									
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	 Ds/Kel	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	 Ds/Kel	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	3) Sidang/Rapat Biasa	 Ds/Kel	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	4) Sewa Gedung Kantor*)	 Ds/Kel	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	5) Perjalanan Dinas/Transport (Rapat kerja, Pelantikan, dan lain-lain)	 Ds/Kel	x	bulan	x Rp.		PB	Rp....		
	e. KPPS									
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)			TPS	x Rp.		PB	Rp....		
	2) Konsumsi (makan dan snack)	 TPS	x	orang	x Rp.		PB	Rp....		
	3) Biaya Pembuatan TPS (Tenda, Meja, Kursi, <i>sound system</i> , dan lain-l)	 TPS			x Rp.		PB	Rp....		
21.	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya									
	a. Kendaraan Operasional Roda 4	 unit	x	bulan	x Rp.		unit	Rp....		
	b. Kendaraan Operasional Roda 2	 unit	x	bulan	x Rp.		unit	Rp....		
	c. Kendaraan Lainnya (transport logistik)	 unit	x	kali	x Rp.		kali	Rp....		
	d. Kendaraan Operasional Roda 2 untuk PPK	 PPK	x	unit	x Rp.		unit	Rp....		

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pengelolaan Logistik Pemilihan					
	a. Sewa gudang		paket	x Rp.		
	b. Pengamanan gudang	 orang	x Kab/Kota	x bulan	x Rp.	
	c. Pengawasan proses logistik (surat suara, dan lain-lain)		paket	x Rp.		
	d. Sortir dan lipat Surat Suara		lembar SS	x Rp.		
	e. Pengesetan Formulir		paket	x Rp.		
	f. Penyiapan kotak dan bilik suara					
	- Persiapan pengelolaan logistik pra Pemilihan (pengepakan)	(... buah	x TPS)	x Rp.		
	- Kotak Suara (termasuk mur dan baut jika bahan Alumumium)	(... buah	x TPS)	x Rp.		
	- Bilik pemungutan Suara (termasuk mur dan baut jika bahan Alumumium)	(... buah	x TPS)	x Rp.		
	JUMLAH					

Keterangan :
Sewa gedung kantor, apabila Pemerintah Daerah tidak menyediakan gedung/kantor untuk PPK dan PPS.
Penyediaan gedung kantor bagi PPK dan PPS oleh Pemerintah Daerah maupun sewa gedung kantor sudah termasuk dengan kelengkapan perkantoran (meja, kursi, kelengkapan kerja, dll)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Nur Saifiah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN
HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN				
1.	Pokja Tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh				
	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 6 bulan
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak 25 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 6 bulan
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	h. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	paling banyak 20 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 8 bulan
	i. Pokja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 8 bulan
	j. Pokja Pelaksanaan Kampanye	paling banyak 18 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 5 bulan
	k. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	l. Pokja Perencanaan dan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	m. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 25 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	o. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 7 bulan
	p. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan Pasangan Calon Terpilih.	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	q. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 1 bulan
	r. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan.	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	t. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan.	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
2.	Susunan Keanggotaan Pokja Di KPU Provinsi/KIP Aceh				
	a. Pengarah	Jumlah personel sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan	OB	Rp.....	
	b. Penanggung jawab		OB	Rp.....	
	c. Ketua		OB	Rp.....	
	d. Sekretaris		OB	Rp.....	
	e. Anggota		OB	Rp.....	
3.	Pokja Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota				
	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 6 bulan
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak 20 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 6 bulan
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	h. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	paling banyak 18 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 8 bulan
	i. Pokja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 8 bulan

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	j. Pokja Pelaksanaan Kampanye	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 5 bulan
	k. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanve	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	l. Pokja Perencanaan dan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	m. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	o. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 7 bulan
	p. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan Pasangan Calon Terpilih.	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	q. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 1 bulan
	r. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan.	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	t. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan.	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
4.	Susunan Keanggotaan Pokja DI KPU Kabupaten/Kota				
	a. Pengarah	Jumlah, sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan	OB	Rp.....	
	b. Penanggung jawab		OB	Rp.....	
	c. Ketua		OB	Rp.....	
	d. Sekretaris		OB	Rp.....	
	e. Anggota		OB	Rp.....	
5.	Pokja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	a. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	b. Pokja Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 1 bulan
6.	Susunan Keanggotaan Pokja DI PPK				
	a. Penanggung jawab	Jumlah Personel sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan	OB	Rp.....	
	b. Ketua		OB	Rp.....	
	c. Sekretaris		OB	Rp.....	
	d. Anggota		OB	Rp.....	
II.	HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN :				
7.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	KPU :				
	a. Ketua	1 orang	OB	Rp.....	Masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	4 orang	OB	Rp.....	sda
	Sekretariat :				
	c. Sekretaris	1 orang	OB	Rp.....	sda
	d. Staf/Pelaksana	paling banyak 3 orang	OB	Rp.....	sda
8.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
	KPU :				
	a. Ketua	1 orang	OB	Rp.....	Masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	2 orang	OB	Rp.....	sda
	Sekretariat :				
	c. Sekretaris	1 orang	OB	Rp.....	sda
	d. Staf/Pelaksana	2 orang	OB	Rp.....	sda
9.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				
	a. Ketua	1 orang	OK	Rp.....	Paket Kegiatan
	b. Anggota	6 orang	OK	Rp.....	sda
	c. Linmas/Pengamanan	2 orang	OK	Rp.....	sda
10.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	1 orang	OB	Rp.....	Masa kerja paling lama 2 bulan

Catatan :
Besaran honorarium mengacu Surat Menteri keuangan
Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN
HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN				
1.	Pokja Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota				
	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 6 bulan
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak 20 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 6 bulan
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	h. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	paling banyak 18 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 8 bulan
	i. Pokja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 8 bulan
	j. Pokja Pelaksanaan Kampanye	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 5 bulan
	k. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	l. Pokja Perencanaan dan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	m. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 2 bulan
	o. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 7 bulan
	p. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan Pasangan Calon Terpilih.	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	q. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 1 bulan
	r. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan.	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
	t. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan.	paling banyak 12 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 4 bulan
2.	Susunan Keanggotaan Pokja DI KPU Kabupaten/Kota				
	a. Pengarah	Jumlah, sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan	OB	Rp.....	
	b. Penanggung jawab		OB	Rp.....	
	c. Ketua		OB	Rp.....	
	d. Sekretaris		OB	Rp.....	
	e. Anggota		OB	Rp.....	
3.	Pokja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	a. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	paling banyak 14 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 3 bulan
	b. Pokja Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK	paling banyak 16 orang	OB	Rp.....	masa kerja paling lama 1 bulan
4.	Susunan Keanggotaan Pokja DI PPK				
	a. Penanggung jawab	Jumlah Personel sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan	OB	Rp.....	
	b. Ketua		OB	Rp.....	
	c. Sekretaris		OB	Rp.....	
	d. Anggota		OB	Rp.....	
II.	HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN :				
5.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
	KPU :				
	a. Ketua	1 orang	OB	Rp.....	Masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	4 orang	OB	Rp.....	sda
	Sekretariat :				
	c. Sekretaris	1 orang	OB	Rp.....	sda
	d. Staf/Pelaksana	paling banyak 3 orang	OB	Rp.....	sda

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
	KPU :				
	a. Ketua	1 orang	OB	Rp.....	Masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	2 orang	OB	Rp.....	sda
	Sekretariat :				
	c. Sekretaris	1 orang	OB	Rp.....	sda
	d. Staf/Pelaksana	2 orang	OB	Rp.....	sda
7.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				
	a. Ketua	1 orang	OK	Rp.....	Paket Kegiatan
	b. Anggota	6 orang	OK	Rp.....	sda
	c. Linmas/Pengamanan	2 orang	OK	Rp.....	sda
8.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	1 orang	OB	Rp.....	Masa kerja paling lama 2 bulan

Catatan :
Besaran honorarium mengacu Surat Menteri keuangan
Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,
Nur Syarifah